

MUHAMMADIYAH SEBAGAI KELOMPOK KEPENTINGAN DALAM POLITIK NASIONAL PASCAORDE BARU TAHUN 1998-2010

Andi Setiawan

Abstract

Muhammadiyah is one of Islamic organizations and even older than Indonesia itself. It is common if Muhammadiyah takes part in solving the trouble of our nation life. As an Islamic organization, Muhammadiyah has missions to carry on the good things and leave the bad things (Amar Ma'ruf Nahi Munkar), thus Muhammadiyah could not keep quiet of something happen in all aspects. As the consequence, Muhammadiyah should apply the mission in religious way whether in economic side; education in managing effort, even in the politic side there is possibly to be used as a way to apply the religious endeavor.

Keywords: *organization, interest group, Muhammadiyah.*

A. PENDAHULUAN

Muhammadiyah merupakan organisasi keagamaan yang besar di Indonesia dan mempunyai pengaruh yang besar pula dalam kehidupan bermasyarakat. Organisasi ini dibentuk oleh KH. Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912 Miladiyah atau 8 Dzulhijjah 1330 Hijriyah di Yogyakarta dengan tujuan merubah perilaku masyarakat yang dianggap menyimpang dan tidak sesuai dengan agama Islam seperti *takhayul, bid'ah, churafat, dan sinkretisme*. Nama Muhammadiyah mengandung pengertian sebagai sekelompok orang yang berusaha mengidentifikasi dirinya atau membangsakan dirinya sebagai pengikut, penerus, dan pelanjut perjuangan dakwah Rasul dalam mengembangkan tata kehidupan masyarakat (Hamdan Hambali, 2006: 7).

Secara umum lahirnya Muhammadiyah dalam rangka merespon kondisi sosio-politik umat Islam akibat kebijakan pemerintah Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belanda tidak hanya melakukan kolonialisme, tetapi Kristenisasi penduduk pribumi. Kebijakan Politik Etis 1901 (politik balas budi) diterapkan Hindia Belanda juga untuk upaya Kristenisasi rakyat pribumi. Kebijakan Politik Etis difokuskan pada bidang edukasi, irigasi, dan kolonisasi. Kebijakan ini telah memberi kesempatan yang lebih besar bagi kaum pribumi mengikuti pendidikan Barat dibanding masa sebelumnya. Meskipun kesempatan yang diberikan lebih besar, tetapi kebijakan itu masih diprioritaskan untuk kalangan elite. Artinya, kesempatan itu hanya untuk pendidikan tingkat rendah, sementara pendidikan tinggi masih terbatas (Syarifuddin Jurdi, 2010: 63)

Dalam perkembangan sejarah tertentu terdapat indikasi ketika Muhammadiyah bersentuhan dengan pergulatan politik nasional, yang sedikit atau banyak mempengaruhi proses gerakan dan dinamika Muhammadiyah. Keterlibatan sebagai anggota istimewa Masyumi di masa Orde Lama, membentuk Parmusi (Partai Muslimin Indonesia) pada awal Orde Baru dan PAN (Partai Amanat Nasional) pada masa Reformasi tahun 1998 serta PMB (Partai Matahari Bangsa) pada tahun 2006, memberikan indikasi bahwa Muhammadiyah tidak dapat menghindari pergulatan politik Indonesia.

Muhammadiyah dalam perpolitikan nasional Indonesia tampak bahwa Muhammadiyah mempunyai dua fungsi yakni fungsi sosial dan fungsi politik. Dari segi historis, politik yang melekat pada Muhammadiyah adalah politik kebangsaan yang sering disebut sebagai politik *amar ma'ruf nahi munkar* (mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran).

Artinya muhammadiyah tidak segan-segan mengkritik pemerintah jika bertindak salah, tetapi Muhammadiyah menjadi pendukung jika pemerintah benar. (<http://www.antaranews.com/news/209299/watak-politik-muhammadiyah>, diakses tanggal 24 April 2012)

Walaupun demikian, akan tetap ada tarik ulur di internal Muhammadiyah terhadap politik. Posisinya serba dilematis, di satu sisi banyak kader yang menginginkan Muhammadiyah konsisten di jalur dakwah, namun di sisi lain ada kecenderungan yang menganggap bahwa inilah momen yang tepat untuk Muhammadiyah terlibat dalam politik praktis agar mempunyai kontribusi dalam upaya reformasi berbagai kebijakan negara demi mengembangkan semangat *amar ma'ruf nahi munkar*.

A.1 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui sikap dan peran Muhammadiyah terhadap perubahan politik periode 1998-2010 dan juga untuk mengetahui dampak dari sikap politik tersebut terhadap kondisi internal organisasi.

A.2 Rangkuman Kajian Teoritik

Sistem politik ialah berbagai macam kegiatan dan proses dari struktur dan fungsi yang bekerja dalam suatu unit / kesatuan, kesatuan tersebut bisa diartikan masyarakat / negara (Rusadi Kantaprawira, 2005: 31). Sedangkan Gabriel A. Almond menyatakan bahwa sistem politik merupakan organisasi melalui mana masyarakat merumuskan dan berusaha mencapai tujuan-tujuan bersama mereka (Gabriel Almond dalam Mohtar Ma'od, 2006: 23)

Dewasa ini dalam mempelajari sistem politik ada dua perwujudan pendekatan sistem, yakni: teori analisis sistem yang dikembangkan oleh David Easton dan teori struktural fungsional yang dikembangkan oleh Gabriel Almond. Teori analisis sistem berasumsi bahwa setiap sistem memiliki sifat (1) terdiri dari banyak bagian-bagian; (2) bagian-bagian saling berinteraksi dan ketergantungan; (3) sistem itu memiliki perbatasan yang memisahkannya dari lingkungan yang terdiri dari sistem-sistem lainnya juga (Mohtar Mas'od, 2006:xii)

Selanjutnya Easton memberikan definisi sistem politik adalah bagian dari sistem sosial yang menjalankan (a) alokasi nilai-nilai (berbentuk keputusan-keputusan / kebijakan-kebijakan, (b) dialokasikan dengan kekuasaan yang sah, (c) mengikat seluruh masyarakat.

Dalam masyarakat modern, otoritas / kekuasaan yang sah memiliki wewenang yang sah untuk menggunakan kekuasaan dan paksaan berbentuk negara. Teori struktural-fungsional yang dikembangkan oleh Gabriel Almond berasumsi bahwa setiap sistem politik harus terdapat fungsi-fungsi demi berlangsungnya sistem politik itu sendiri.

Secara umum ciri yang dimiliki sistem politik adalah adanya fungsi-fungsi politik. Fungsi-fungsi politik dalam sistem politik dibagi dalam dua bagian, yakni: fungsi input berupa: artikulasi kepentingan, sosialisasi politik dan rekrutmen politik; fungsi output yaitu pembuatan, penerapan, penghakiman kebijakan. Struktur politik diartikan suatu interaksi yang dianggap sah, tujuannya mempertahankan dan memelihara tata masyarakat (Mohtar Mas'od, 2006: xiii)

Sistem politik dilaksanakan melalui struktur politik / lembaga politik. Lembaga politik dibedakan antara supra-struktur dan infra-struktur politik. Supra-struktur politik merupakan lembaga politik yang berfungsi menjalankan mesin politik secara formal / lembaga-lembaga resmi pemerintahan negara.

Supra-struktur politik berupa (badan legislatif, eksekutif, dan badan peradilan). Supra struktur politik di Indonesia pelaksanaannya dapat melibatkan lembaga-lembaga negara baik ditingkat pusat maupun di daerah-daerah. Infra-struktur politik berperan sebagai mesin politik informal. Sumbernya dari kekuatan riil masyarakat meliputi: partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, lembaga swadaya masyarakat, dan media massa.

Proses politik dalam sistem politik menurut pendekatan yang dikembangkan oleh Easton dan Almond dapat dijelaskan sebagai berikut:

“Proses politik berawal dari masukan input yang berupa: kepentingan yang diartikulasikan / dinyatakan oleh kelompok kepentingan, diagregasikan, dipadukan oleh partai politik sehingga menjadi suatu kebijakan yang bersifat umum, selanjutnya dimasukkan dalam proses pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh legislatif dan eksekutif. Input tadi diubah menjadi output berupa kebijaksanaan. Kebijaksanaan ini dilaksanakan oleh birokrasi, kesungguhan pelaksanaan ini dijamin dan diawasi oleh fungsi penghakiman yang dijalankan oleh fungsi peradilan. Demikian proses tersebut berjalan, dari input berupa tuntutan kepentingan diubah menjadi output, dan memulai proses baru lagi menjadi input (Mohtar Mas’oed, 2006: xiii)

Kelompok kepentingan memusatkan perhatian pada upaya mengartikulasikan kepentingan tertentu yang ditujukan pemerintah. Pemerintah berharap pemerintah menyusun kebijakan yang memihak kelompoknya. Keanggotaannya berasal dari golongan-golongan yang merasa tertindas atau terpinggirkan oleh kebijakan-kebijakan dari elit politik. Mereka punya tujuan yang sama yakni memperbaiki nasib mereka. Dasar perjuangan dari kelompok kepentingan adalah protes dan sikap kritis terhadap cara-cara berpolitik dari para politisi dan pejabat. Hal ini dilandasi perasaan terasingkan atau terpinggirkan.

Kelompok kepentingan menginginkan desentralisasi dari kekuasaan dan partisipasi dalam peningkatan swadaya masyarakat. Kelompok ini selalu berinteraksi dengan badan eksekutif namun tetap memosisikan kedudukannya sebagai organisasi yang otonom terhadap negara. Cara kerja kelompok kepentingan tidak menggunakan tekanan-tekanan ataupun paksaan, tetapi melalui hubungan ke dalam (*lobbying*) serta jaringan kerja (*networking*) yang intensif tetapi persuasif.

Jika cara-cara di atas tidak berhasil terkadang menggunakan cara-cara lebih keras seperti: demonstrasi, unjuk rasa dan pemogokan kerja. Jika cara-cara kekerasan ini ditempuh maka tidak bisa dinamakan lagi kelompok kepentingan tetapi, kelompok penekan. Ciri organisasi ini adalah mempunyai jaringan luas, tidak hanya didalam negeri, tetapi di luar negeri juga ada. Di pihak lain organisasi ini dapat dimanfaatkan sebagai mediator antara pemerintah dan masyarakat serta dijadikan alat kontrol dan penyalur aspirasi selain lewat partai politik.

Klasifikasi kelompok kepentingan terdapat berbagai tipe, antara lain sebagai berikut:

1. Berdasarkan jenis kegiatannya.
Dilihat dari jenis kegiatannya dikenal berbagai macam kelompok kepentingan seperti kelompok profesi, okupasi, kepemudaan, kelompok kewanitaan, kelompok pecinta lingkungan hidup.
2. Berdasarkan lingkungan kepentingan.
Kepentingan yang memperjuangkan kepentingan kalangan yang terbatas, seperti: petani dengan wadah organisasinya HKTI, organisasi guru dalam PGRI, organisasi bagi pegawai negeri yang terakomodasi dalam KORPRI, organisasi profesi dokter terhimpun dalam IDI.

3. Berdasarkan gaya, metode, dan cara mengajukan kepentingannya.
Gabriel A. Almond membedakan kelompok kepentingan menjadi empat bentuk, antara lain:
 - a. Kelompok Anomik: Kelompok anomik terbentuk di antara unsur-unsur dalam masyarakat secara spontan dan hanya bersifat sementara dan tidak memiliki norma dan sistem yang jelas. Kelompok ini tidak memiliki jaringan resmi dengan organisasi politik maupun institusi lainnya. Organisasi ini sangat longgar dan hanya terbatas pada bentuk-bentuk forum, komite, dan sejenisnya. Kelompok ini juga dapat menumbuhkan keberanian rakyat untuk mengambil posisi berbeda dengan penguasa.
 - b. Kelompok Non-Asosional: Kelompok ini tidak terorganisir dan kurang teratur, kegiatan bersifat insidental. Secara teoritis, kegiatan kelompok non-asosional merupakan ciri masyarakat yang belum maju, di mana kesetiaan kesukuan atau keluarga-keluarga aristokrat mendominasi kehidupan politis.
 - c. Kelompok Institusional: Organisasi seperti partai politik, korporasi bisnis, badan legislatif, organisasi keagamaan sering kali mendukung kelompok institusional. Kelompok ini bersifat formal dan memiliki fungsi-fungsi politik dan sosial. Kelompok ini juga mempunyai pengaruh kuat dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah, hal ini karena basis dari kelompok ini kuat.
 - d. Kelompok Assosional: Kelompok assosional meliputi serikat buruh, kelompok keagamaan, organisasi sosial. Secara khusus, kelompok assosional menyatakan kepentingan dari suatu kelompok khusus, menggunakan pekerja yang profesional, dan memiliki prosedur yang teratur guna merumuskan kepentingan dan tuntutan. Basis organisasionalnya menempatkannya di atas kelompok non-assosional, strategi dan tujuannya dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

A.3 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Lokasi penelitian dilaksanakan di kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta dan PP Muhammadiyah Jakarta. Alasan penentuan lokasi ini karena para pengurus beraktifitas di kota Yogyakarta dan Jakarta Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini ada dua yaitu:

- a. Data primer, yaitu data yang relevan dengan pemecahan masalah atau pembahasan yang didapat dari sumber utama yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti sendiri. Data primer dalam penelitian ini bersumber dari hasil wawancara dengan pengurus pimpinan Muhammadiyah seperti Ketua Muhammadiyah Pusat dan Wilayah Jawa Tengah, pengurus Majelis Pembina Kesehatan Umum, Majelis Dikdasmen
- b. Data sekunder, yaitu data yang bersifat mendukung pembahasan, data yang diperoleh berasal dari buku, artikel, majalah, dokumen-dokumen, ataupun media internet yang berhubungan dengan penelitian ini.

Teknik pemilihan sampel adalah *nonprobability sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang dan kesempatan sama bagi setiap unsur populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik *nonprobability sampling* yang

dipilih penulis menggunakan *purposive*, yaitu suatu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu.

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah dengan studi pustaka dan wawancara. Penelitian dengan studi pustaka adalah penelitian yang dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur yang relevan dengan obyek studi, baik dari perpustakaan maupun institusi lainnya.

Penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah **metode analisis kualitatif**, yaitu suatu metode analisis data yang menggunakan teknik telaah logika untuk menyimpulkan data bersifat kualitatif yang dipergunakan untuk data-data yang sulit diukur dengan angka-angka, yaitu apabila data yang dikumpulkan hanya sedikit, berupa kasus-kasus sehingga dengan analisis tersebut dapat diberikan penafisiran data yang lebih baik.

A.4. Hasil Penelitian

Dari literature yang diperoleh bahwa Muhammadiyah selalu berhati-hati dalam menghadapi dinamika politik yang berkembang. Muhammadiyah tidak akan menjadi partai politik, jatidiri Muhammadiyah adalah gerakan keagamaan. Kiprah Muhammadiyah dalam politik lebih pada sikap Muhammadiyah memainkan fungsi lobbying dan pendekatan-pendekatan yang lentur yang banyak dipengaruhi budaya akomodatif sehingga tidak menimbulkan konfrontasi. Budaya politik yang akomodatif sudah menjadi ciri politik Muhammadiyah dan dilandasi dengan prinsip gerakan sehingga tidak keluar dari komitmen Muhammadiyah. Muhammadiyah dengan statusnya sebagai organisasi sosial keagamaan dapat memainkan fungsi politiknya melalui amal usaha seperti pendidikan dan kesehatan. Peran-peran Muhammadiyah dalam amal usahanya sedikit banyak mempengaruhi pemerintah. Pemerintah dalam perannya mencapai tujuan Negara tidak dapat berjalan sendiri. Muhammadiyah hadir untuk membantu pemerintah dalam rangka mencapai tujuan bersama. Bisa disimpulkan bahwa antara pemerintah dan Muhammadiyah saling melengkapi dan membantu.

B. PEMBAHASAN

B.1. Muhammadiyah dan Politik

a. Muhammadiyah dan Pendirian Partai

Sikap netral terhadap partai politik diputuskan dalam Mukhtamar ke-38 di Ujung Pandang (sekarang Makassar) terus dipertahankan oleh Muhammadiyah. Sikap netral terhadap partai politik untuk menghindari konflik-konflik yang dapat merugikan Muhammadiyah. Partai politik bersikap pragmatis, sedangkan Muhammadiyah mempunyai tujuan yang lebih luas yakni membangun umat.

Sikap netral Muhammadiyah, baik secara kelembagaan atau perorangan, bukan tanda jika anti politik, terutama masa kejatuhan Soeharto. Pasca Kejatuhan Soeharto menjadi bukti lahirnya banyak partai politik. Berdirinya PAN yang dimotori oleh Amien Rais menjadi dinamika internal Muhammadiyah. Tidak hanya PAN, partai-partai lain juga mengaitkan diri dengan Muhammadiyah. Pengaitan itu karena adanya kesepahaman dalam pengamalan ajaran Islam, faktor lain yang menyebabkan Muhammadiyah mempunyai kedekatan seperti faktor elite dan kader organisasi yang masuk partai.

Proses politik dalam Muhammadiyah dan upaya penghimpitan dengan partai terus berlangsung. Pada pemilu 2004 lebih ditujukan ke partai tunggal yakni PAN. Pada pemilu 2009, upaya menghimpitkan Muhammadiyah meluas dengan lahirnya PMB, oleh para AMM (Angkatan Muda Muhammadiyah). Relasi dengan PAN yang dianggap bermasalah dalam pemilu 2004 dan lahirnya PMB sebagai partai alternatif merupakan fenomena dari pragmatisme politik sebagian warga Muhammadiyah. Munculnya Ketua Umum PP Muhammadiyah dalam pertemuan nasional PMB menunjukkan adanya tarik-menarik kepentingan antar elite Muhammadiyah. Antara PAN dan PMB yang memperebutkan suara Muhammadiyah, di mana suara Muhammadiyah tersebar dalam berbagai partai politik. Proses perebutan pengaruh antara PAN dan PMB, dapat memicu konflik internal Muhammadiyah.

Pihak yang menghendaki posisi netral, Muhammadiyah tetap sebagai gerakan sosio-kultural yang tidak terkait dengan kekuatan politik manapun. Pihak yang menjaga agar Muhammadiyah tetap netral dan menjaga tarik-ulur politik, karena memahami nilai perjuangan dan bagaimana cita-cita sosial Muhammadiyah dapat diwujudkan tanpa dihubungkan dengan politik. Sedangkan pihak yang berusaha mendekatkan Muhammadiyah dengan politik memandang bahwa perjuangan Muhammadiyah dapat maksimal dengan memiliki hubungan tertentu dengan partai politik.

b. *Muhammadiyah dan Amandemen UUD 1945*

Amandemen UUD 1945 menjadi perhatian utama pasca Orde Baru, karena penyimpangan kekuasaan yang terjadi karena longgar dan tidak tegasnya konstitusi. Amandemen konstitusi dilakukan untuk menciptakan suatu sistem yang lebih demokratis yang menjadi tujuan reformasi. Beberapa pasal yang dianggap sebagai sumber persoalan bangsa misalnya masa jabatan presiden dan proses pemilihan presiden, hubungan antara pusat dan daerah serta kekuasaan kehakiman menjadi perhatian penting dalam proses amandemen konstitusi. Pasal 29 tentang agama, oleh sebagian kelompok Islam ikut diamandemen dengan memasukkan Piagam Jakarta.

Muhammadiyah yang mempunyai andil politik dalam pencapaian konsensus mengenai Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Ketika isu tersebut menguat pada tahun 2000, meskipun dalam Muhammadiyah terdapat tarik-ulur, tetapi Muhammadiyah tetap kuat dalam menyikapi tuntutan diberlakukannya syariat Islam. Dahulu Muhammadiyah memperjuangkan legal formal syariat Islam, tetapi kini legal formal bukan jaminan bagi adanya perbaikan perilaku umat. Dalam pandangan Muhammadiyah, legal formal Islam dalam konstitusi harus mempertimbangkan kondisi politik, umat Islam, ruang dan waktu. Bagi Muhammadiyah, kondisi yang ada pada waktu itu tidak memungkinkan untuk memasukkan syariat Islam dalam konstitusi negara. Muhammadiyah tidak menolak diberlakukannya syariat Islam, tetapi konteksnya yang tidak tepat untuk memperjuangkannya. Pada kenyataannya, Muhammadiyah berada dalam posisi di depan dalam memperjuangkan syariat Islam.

c. *Perilaku Politik Muhammadiyah*

Budaya merupakan tradisi yang mengakar di masyarakat. Budaya politik yang berkembang dalam masyarakat merupakan keyakinan kuat yang secara berulang kali terjadi dalam suatu masyarakat itu. Istilah kebudayaan didasarkan pada dua alasan yakni pertama, jika ingin mengetahui hubungan antara sikap politik dengan pola-pola perkembangan, harus memisahkan kedua faktor tersebut. Istilah kebudayaan politik menitikberatkan pada orientasi politik, sikap terhadap sistem politik dan bagian-bagian lain.

Dalam Muhammadiyah, budaya politik juga berkembang. Muhammadiyah mengembangkan budaya politik yang akomodatif. Di mana Muhammadiyah selalu melakukan kerja sama dengan pemerintah dalam perjalanannya. Untuk itu, Muhammadiyah dianggap meleburkan diri kepada pihak-pihak yang berkuasa untuk kepentingan politiknya. Menurut Haedar Nashir istilah "sikap politik yang akomodatif" atau "perilaku politik yang akomodatif" merupakan hal yang netral dalam khazanah politik. Politik bahkan mengandung akomodasi. Sikap politik akomodatif menunjukkan perilaku politik yang kompromi terhadap pemerintah sekalipun tidak selalu mengintegrasikan diri dalam kekuasaan. Meskipun Muhammadiyah bersikap akomodatif tetapi, Muhammadiyah tidak boleh terjebak dan berafiliasi dengan kekuasaan. Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan yang netral tidak boleh bekerja yang dapat membawa ke ranah politik praktis. Jika Muhammadiyah masuk ke dalam wilayah politik praktis, Muhammadiyah akan mengalami perubahan status yang akibatnya akan menghilangkan jati diri aslinya.

d. *Suksesi dari Ulama ke Cendekiawan*

Terpilihnya Amien Rais dalam Muktamar ke-43 di NAD pada bulan juli 1995 sebagai Ketua PP Muhammadiyah, membuat Muhammadiyah lebih dinamis, kritis dan cenderung berorientasi politis. Terpilihnya Amien Rais menandai pergeseran kepemimpinan dari ulama kepada cendekiawan dalam Muhammadiyah. Kepemimpinan di bawah Amien Rais menunjukkan ketidakkompakkan karena Amien Rais cenderung melakukan tindakan sosial-politis tanpa konsultasi dengan pimpinan yang lain. Hal ini berakibat munculnya dua kubu, yakni kubu Yogyakarta yang dipimpin Amien Rais, Syafii Maarif, dan golongan muda seperti Haedar Nashir, Immawan Wahyudi, Izzul Muslimin. Kubu Jakarta oleh Lukman Harun yang didukung tokoh politik seperti Din Syamsudin. Perbedaan itu merujuk pada kubu Yogyakarta yang menghendaki Muhammadiyah memainkan fungsi kritik sosial-politik sebagai wujud kontribusi dalam mengatasi persoalan nasional. Sedangkan kubu Jakarta menginginkan Muhammadiyah sesuai dengan posisinya yakni organisasi keagamaan tanpa ikut serta dalam urusan sosial-politik.

e. *Partai Politik Memperebutkan Muhammadiyah*

Ada tiga partai yang saat ini yang sedang berhimpitan dengan Muhammadiyah. Ketiga partai itu antara lain PAN, PMB, PKS. Masih banyak partai yang juga ingin menghimpitkan dan mengambil keuntungan dari Muhammadiyah, walau secara ideologis tidak memiliki

hubungan dengan Muhammadiyah. Bagi Muhammadiyah, posisi seperti ini merugikan karena terjadi tarik-ulur dalam internal Muhammadiyah. Dengan adanya fenomena tersebut, Muhammadiyah tetap kokoh dalam pendiriannya. Muhammadiyah secara tegas menyatakan bahwa Muhammadiyah tidak memiliki hubungan secara organisatoris, maupun tidak memiliki afiliasi ke partai manapun.

B.2. MUHAMMADIYAH DAN AMAL USAHA

Amal usaha Muhammadiyah yang terwujud dalam berbagai lembaga pendidikan seperti TK Busthanul Athfal 'Aisyiyah, SD, SMP, SMA, PTM. Tak hanya pendidikan, Muhammadiyah dalam bidang kesehatan juga memiliki rumah sakit, balai kesehatan, panti asuhan. Amal usaha tersebut tumbuh dari partisipasi warga dan simpatisan Muhammadiyah. Usaha yang dilakukan Muhammadiyah dalam amal usahanya merupakan prinsip dari beramal shaleh, artinya segala langkah usaha Muhammadiyah dilandasi, dimotivasi, dibingkai, dan memiliki orientasi pesan pada ajaran Islam. Amal dalam Muhammadiyah bersifat konkret, artinya Muhammadiyah dalam mewujudkan Islam sebagai ajaran dalam kehidupan harus nyata, karena itu dikatakan sebagai amal usaha. Amal usaha dalam Muhammadiyah berhubungan erat dengan tujuan dan misi Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Maksud dan tujuan Muhammadiyah adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

C. PENUTUP

Muhammadiyah lebih memposisikan dan menempatkan diri sebagai kelompok kepentingan sekaligus gerakan sosial keagamaan yang nonpolitik dan tidak memasuki dunia politik praktis, meskipun dalam perkembangannya memiliki keterlibatan tertentu dengan partai politik dan dalam batas tertentu aktif dalam kegiatan politik praktis. Politik praktis yang dimaksud adalah kegiatan-kegiatan politik yang bersifat langsung dalam perjuangan kekuasaan untuk memperebutkan posisi-posisi politik di pemerintahan.

Muhammadiyah sebagai kelompok kepentingan sekaligus gerakan sosial keagamaan dengan menampilkan wujud Islam kultural lebih memilih bergerak dalam lapangan tabligh, pendidikan, dan pembinaan kesejahteraan sosial melalui amal usaha yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan sifat pembaharuannya, Muhammadiyah menjadi golongan yang sadar akan kemajuan tetapi konservatif dalam mempertahankan kepribadiannya. Sikap dasar Muhammadiyah yang lebih banyak memainkan fungsi politik tidak langsung dengan melakukan *lobbying* dan pendekatan-pendekatan.

Sikap politik Muhammadiyah yang akomodatif menjadi pilihan karena menjauhi konfrontasi sejauh tidak bertentangan dengan prinsip gerakannya. Kecenderungan politik yang demikian mencerminkan sikap yang lunak dalam berdakwah secara struktural, ruang dialog yang terbuka dengan penguasa, membuat nilai tawar Muhammadiyah diperhitungkan tanpa terperangkap dalam kekuasaan.

Muhammadiyah mempunyai amal usaha yang merupakan bentuk dari eksistensi Muhammadiyah dan keberadaannya sangat penting untuk membantu pemerintah dan bukan menjadi pesaing dari pemerintah. Antara pemerintah dan Muhammadiyah berjalan beriringan dan saling membantu guna mencapai tujuan bersama.

DAFTAR RUJUKAN

- Damami, Mohammad, *Akar Gerakan Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru). 2000
- Hambali, Hamdan, *Ideologi dan Strategi Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah), 2006,
- Jurdi, Syarifuddin, *Muhammadiyah dalam Dinamika Politik Indonesia 1966-2006*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2010
- Mas'ood, Mochtar; Colin Mac Andrews, *Perbandingan Sistem Politik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press), 1995.
- Meleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya), 2001
- Mulkan, Abdul Munir, *Pemikiran Kyai Haji Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah dalam Perspektif Perubahan Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara), 1990
- Nashir, Haedar, *Dinamika Politik Muhammadiyah*, (Malang: UMM Press), 2006
- Suminto, Aqip. *Politik Islam Hindia Belanda*, (Jakarta: LP3ES), 1985
- Suwarno, *Muhammadiyah Sebagai Oposisi*, (Yogyakarta: UII Press), 2002
- Syaifullah, *Gerak Politik Muhammadiyah Dalam Masyumi*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti), 1997
- <http://www.antara.co.id/arc/2008/11/25/profil-partai-pmb-matahari-baru-warga-muhammadiyah>
- <http://www.antaraneews.com/news/209299/watak-politik-muhammadiyah>